

Laporan Penelitian

PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI IAIN ALAUDDIN  
UJUNG PANDANG

Oleh :  
Ahkam Jayadi

Dibiayai Oleh DPP IAIN ALAUDDIN

PUSAT PENELITIAN IAIN ALAUDDIN  
UJUNG PANDANG  
1996



Laporan Penelitian

ENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI IAIN ALAUDDIN  
UJUNG PANDANG

Oleh :  
**Ahkam Jayadi**

Dibiayai Oleh DPP IAIN ALAUDDIN

PUSAT PENELITIAN IAIN ALAUDDIN  
UJUNG PANDANG  
1996



LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : PELAKSANAAN UU No. 25 TAHUN  
1992 PADA KPN IAIN ALAUDDIN  
UJUNG PANDANG  
b. Macam Penelitian : Deskriptif  
c. Kategori Penelitian :
- 

2. Kepala Proyek Penelitian :  
a. Nama Lengkap : Ahkam Jayadi, S.H.  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Tk I/III-d/150231530  
d. Jabatan : Lektor Madya  
e. Fakultas/Jurusan : Syari'ah  
f. Perguruan Tinggi : IAIN Alauddin Ujung Pandang  
g. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
- 

3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
- 

4. Lokasi Penelitian : Ujung Pandang
- 

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
- 

6. Biaya Yang Disetujui : Rp. 1.000.000,-
- 

Ujung Pandang, 8 Pebruari 1996

Konsultan,

Peneliti,

  
Drs. H. Amir Paita, S.H.

Nip. 150 003 086

  
Ahkam Jayadi, S.H.

Nip. 150231530

Mengetahui:

Kepala Pusat Penelitian

  
  
DR. M. Natsir Mahmud, MA

Nip. 150 217 170

## ABSTRAK

Penelitian ini akan mengungkapkan sejauh mana Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, pembentukan dan pengelolaannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992. Usaha untuk memperoleh data kualitatif telah digunakan metode wawancara dengan: Pengurus, Badan Pemeriksa, Anggota serta Pejabat. Sedangkan untuk dapat memperoleh data kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang ada pada koperasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memperbandingkan UU No. 25 tahun 1992 dengan Anggaran Dasar, pengkategorian, penganalisaan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Struktur dari organisasi KPN Al-Muanah IAIN Alauddin Ujung Pandang secara umum telah sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 sebagaimana terlihat dalam Anggaran Dasarnya. Hanya saja yang menjadi masalah mengingat AD tersebut dibuat pada tahun 1978, maka saat ini AD tersebut sudah seharusnya diadakan perubahan untuk memperbaikannya agar disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Aspek-aspek yang harus diperbaiki adalah: asas koperasi, bidang usaha, masa jabatan pengurus, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib serta pertanggung

jawaban dan sanksi terhadap pelanggaran aturan koperasi.

Demikian juga dengan kinerja koperasi yang tidak sehat.

Meskipun struktur organisasi telah sesuai dengan UU sebagaimana terjabarkan dalam AD, akan tetapi dalam pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga berakibat pada tidak sehatnya kinerja koperasi serta tidak berkembangnya SHU yang diperoleh koperasi.



**DEPARTEMEN AGAMA R.I**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNGPAKANG**  
**PUSAT PENELITIAN**

*Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp 864928 - 864931 (Fax 864623)*

**KATA SAMBUTAN**

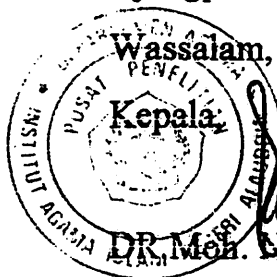
Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena penelitian ini telah selesai dilaksanakan untuk tahun 1995/1996.

Penelitian merupakan dharma kedua dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut berarti bahwa setiap dosen maupun mahasiswa mempunyai tugas melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus berfungsi sebagai masukan bagi upaya pembangunan Agama, Bangsa dan Negara.

Kami tetap mengharapkan agar penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam lingkungan IAIN Alauddin dapat semakin meningkat di masa akan datang, baik dalam hal kuantitasnya maupun kualitasnya.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Peneliti yang telah melaksanakan penelitiannya dengan baik dan mengharapkan agar penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmiah, khususnya di IAIN dan untuk diaplikasikan dalam pembinaan masyarakat dan bangsa. Semoga Allah SWT memberikan kepadanya pahala yang setimpal, Amin.

Ujungpandang,      Pebruari 1996



DR. Moh. Natsir Mahmud, M.A.

NIP. 150 217 170

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, maka laporan hasil penelitian ini telah selesai disusun. Namun demikian, disadari bahwa adanya faktor keterbatasan pada berbagai hal maka laporan hasil penelitian ini bukan tanpa kelemahan.

Untuk itu, kami berharap dari para sejawat agar dapat memberikan saran-saran guna kesempurnaan karya ini, yang pada gilirannya dapat dijadikan arahan dan acuan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan perkoperasian. Tentunya juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pengusahaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan hukum perkoperasian nasional.

Melalui media ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Alauddin, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian.
2. Bapak Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin yang juga atas perkenangannya sehingga kami dapat meneliti.
3. Bapak Dekan Fak. Syari'an yang juga atas izinnya pada kami, sehingga penelitian ini dapat dilakukan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik Bapak-bapak sekalian dan kita senantiasa dalam lindungannya.

Peneliti,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan .....	17
3.2. Pengumpulan Data .....	17
3.3. Analisis Data .....	19
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	20
4.2. Anggaran Dasar .....	22
4.3. Keanggotaan, Kewajiban dan Hak .....	25
4.4. Perangkat Organisasi .....	31
4.4.1. Rapat Anggota .....	31
4.4.2. Pengurus .....	40
4.4.3. Pengawas .....	50
4.5. Modal .....	53
4.6. Lapangan Usaha .....	56
4.7. Sisa Hasil Usaha .....	59
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran-saran .....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Later Belakang:

Pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan pada saat sekarang ini, pada hakekatnya adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional ini merupakan cita-cita bangsa sejak awal memasuki kemerdekaan Indonesia, dan sekaligus merupakan amanah dari konstitusi yang mengikat kita semua dalam menentukan arah kebijaksanaan dalam kiprah pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut kita perlu mengerahkan segala sumber dan kekuatan nasional bagi upaya memenuhi kepentingan pembangunan yang kita laksanakan dan galakkan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Dalam menyusun perencanaan, keterpaduan program dan menentukan pentahapan pembangunan nasional, kita selalu berusaha untuk menyesuaikan antara unsur-unsur obyektif dari sumber dan kekuatan nasional serta faktor faktor dominan yang berpengaruh. Demikian juga dengan unsur-unsur normatif dan aspiratif yang dicita-citakan,

agar kegiatan pembangunan yang kita laksanakan tidak menyimpang dari tujuan nasional yang telah ditetapkan dan menjadi pegangan bagi kita semua.

Kita semua tentu menyadari, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, mempunyai sumber dan kekayaan nasional, baik yang efektif maupun potensial untuk dapat melaksanakan pembanguana. Kita pun menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan, kita harus senantiasa memperhatikan berbagai faktor seperti: kependudukan dan sosial budaya yang senantiasa berkembang secara dinamis; wilayah yang bercirikan kepulauan dan kedaulatan dengan lingkungan dan alam tropiknya; sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.

Kalau kita perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada beberapa dekade terakhir ini, khususnya yang menyangkut bidang ekonomi. Kita dapat melihat bahwa perekonomian Indonesia yang terbuka, menuntut kita semua untuk dapat menyesuaikan dengan arus perekonomian global yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kondisi yang demikian kita dituntut untuk selalu berupaya mencari berbagai alternatif dalam mengoptimalkan segala sumber dan kekuatan nasional bagi pembangunan ekonomi kita. Tanpa upaya yang demikian, kita tidak akan mampu memanfaatkan berbagai hal yang terjadi dan kita pun akan sulit menghadapi berbagai tantangan yang

semakin kompleks dalam persaingan yang semakin ketat.

Pembangunan ekonomi yang kita laksanakan secara intensif sejak awal Pelita I, telah menghasilkan suatu transformasi struktural perekonomian nasional dengan berbagai kemajuan yang berarti bagi seluruh kehidupan dari masyarakat, bangsa dan negara. Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pada umumnya telah meningkat, walaupun penyebaran dan tingkatannya masih belum sepenuhnya merata.

Menurut Soemitro (1992) produksi nasional selama 25 tahun terakhir ini telah meningkat 4,5 kali lipat dari periode sebelumnya. Dan tingkat hidup rata-rata naik 2,5 kali lipat. Sektor industri yang menyerap sekitar 13 % angkatan kerja telah meningkat rata-rata 11 % pertahun. Sedangkan sektor pertanian yang menyerap lebih dari 50 % angkatan kerja hanya meningkat rata-rata 2,7 % pertahun. Sementara itu laju pertumbuhan jumlah penduduk berhasil ditekan menjadi kurang dari 2 % pertahun (M.Amin Azis 1993: 3-5).

Perkembangan demokrasi ekonomi seperti yang terjadi sekarang ini, struktur perekonomian nasional masih akan terus berubah dan berkembang ke arah yang lebih mantap. Sektor-sektor usaha negara dan swasta yang dipacu untuk meningkatkan ekspor non migas melalui berbagai kemudahan fasilitas dan subsidi, memang telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Namun diantaranya masih ada yang kelihatan "rapuh" akibat perkembangan yang tidak seimbang dengan



kapasitas dan daya dukung sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri, maka pengembangan dan pembinaan usaha nasional akan terus didorong kearah terjadinya suatu perluasan kerja sama dan keterkaitan antar sektor dan antar sub sektor. Antara usaha skala besar, menengah dan kecil, baik dalam investasi maupun perdagangan, berdasar kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan asas kebersamaan.

Dengan demikian, usaha nasional kita yang meliputi: koperasi; usaha negara dan swasta diharapkan akan makin berperan dalam mendorong perkembangan pasar dalam negeri. Demikian juga dalam meningkatkan daya beli rakyat serta makin mampu bersaing untuk melakukan terobosan pasar-pasar Internasional, sehingga akan mampu menghadapi arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia.

Dengan berkembangnya lembaga koperasi diantara semua lembaga-lembaga ekonomi yang telah ada, struktur perekonomian nasional kita akan berkembang lebih baik, lebih efisien dan lebih demokratis. Kelembagaan koperasi dapat difungsikan untuk menyempurnakan bekerjanya fungsi pasar sehingga lebih rasional dan efisien.

Untuk itu kesedaran dan keyakinan pemerintah akan pentingnya pengembangan koperasi, selain didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional menurut perkembangan perubahan keadaan, juga dilandasi oleh komitmen pemerintah

untuk melaksanakan amanah konstitusional dari UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Di dalam amanah konstitusional itu secara eksplisit disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Realitas dewasa ini menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan wujud peranannya secara efektif. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.

Terbatasnya modal koperasi menjadi faktor ganda yang membentuk hubungan sebab akibat lemahnya perkoperasian di Indonesia selama ini. Hubungan tadi menjadi lingkaran setan yang membelit dan semakin memperlemah posisinya.

Upaya untuk memutuskan lingkaran setan ini tak dapat diserahkan pada mekanisme pasar tetapi harus dilakukan melalui upaya terobosan struktural. Tanpa itu, koperasi di Indonesia diperkirakan sulit untuk berkembang apalagi berperan dalam pencatutan perekonomian sebagai pelaku ekonomi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Terobosan struktural yang dimaksud adalah dilakukan nya restrukturisasi dalam penguasaan faktor produksi dalam hal ini khususnya permodalan. (Panji Aneraga dan Ninik Widiyanti, 1993 : 127)

Koperasi sebagai Badan Usaha telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pada pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 diatur tentang fungsi dari koperasi. Untuk merealisasikan pasal tersebut maka khususnya pada berbagai Instansi Pemerintah dibentuk badan usaha koperasi yang lebih dikenal dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Salah satunya adalah KPN Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Koperasi hingga kini, selalu menarik untuk diteliti oleh karena perkembangannya masih memperlihatkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (das sein dan das sollen). KPN IAIN misalnya, masih banyak menghadapi hambatan dan permasalahan. Terutama dari sudut kelembagaannya, pengelolaan usaha-usaha dan kegiatan koperasi, serta hal hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dari pengurus sesuai dengan amanah UU No. 25 tahun 1992. Dan hal yang tak kalah menariknya untuk diteliti adalah yang menyangkut periode kepengurusan koperasi yang ada sekarang ini, belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) yang tentu saja tidak dapat dibenarkan sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah koperasi khususnya UU No. 25 tahun 1992.



## 1.2. Rumusan Masalah:

Penelitian ini sesuai dengan judulnya, akan meneliti Koperasi Pegawai Negeri ( KPN ) Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Alauddin Ujung Pandang, dengan bertolak pada apa yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Masalah pokok penelitian ini adalah: "Apakah KPN IAIN Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992" dan dari masalah pokok tersebut selanjutnya dirinci dalam tiga sub masalah, yaitu:

1. Apakah Struktur Organisasi Yang Ada Pada KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang Telah Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992.
2. Apakah Pengelolaan KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang Telah Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Dan Anggaran Dasarnya.
3. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dialami Dalam Upaya Peningkatan Kinerja KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang.

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan:

#### Tujuan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas yang ada pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang eksistensi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang dilihat dari tolok ukur UU No. 25 tahun 1992.
3. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat pula mengungkapkan hambatan kinerja KPN Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang.

#### Kegunaan:

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat guna pengambilan kebijaksanaan dalam memperbaiki KPN IAIN Alauddin sebagai suatu Badan Usaha Koperasi serta kemungkinannya untuk pengembangannya di masa datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat pula di manfaatkan oleh Pemerintah guna pembinaan KPN pada umumnya dan KPN Al-Muawanah khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (1) telah menetapkan bahwa: perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut antara lain menyebutkan bahwa, kemakmuran bersama masyarakatlah yang diutamakan bukanlah kemakmuran orang seorang dan bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Penjelasan pasal tersebut menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. (Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1995 : 12)

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas, jelaslah koperasi sangatlah penting dalam upaya kita menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan "demokrasi ekonomi" yang ciri cirinya adalah:

1. demokratis.
2. kebersamaan.
3. kekeluargaan.
4. dan keterbukaan. (Wahyu Sukotjo, 1987)

Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi haruslah memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas khusus-



nya menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Hanya saja dalam praktik, perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, serta pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya dapat menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945. (Bustanul Arifin, 1993 : 19)

Koperasi mempunyai dua pengertian, yaitu koperasi menurut pengertian hukum dan koperasi menurut pengertian ekonomi. Koperasi menurut pengertian hukum (Abdulkadir Muhammad, 1983 : 26) merupakan perhimpunan orang-orang:

1. dengan keanggotaan berubah-ubah.
2. didasarkan atas azas berdikari.
3. untuk memajukan kepentingan ekonomi para anggota - nya.
4. yang menjalankan usaha yang dimiliki bersama.
5. dimana pemilik dan penggunaan usaha bersama itu adalah orang-orang yang sama (azas identitas).
6. didaftarkan menurut undang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut pengertian ekonomi (Abdulkadir Muhammad, 1983 : 24) mempunyai empat ciri yaitu:

1. sekelompok orang yang disatukan oleh paling sedikit satu kepentingan ekonomi yang sama bagi semua anggota kelompok itu.
2. tujuan kelompok, baik secara keseluruhan maupun setiap anggota kelompok secara individual, yaitu

memajukan kepentingan bersama berdasarkan prinsip solidaritas.

3. alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama.
4. tujuan utama bidang usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.

Sebagai Badan Usaha Koperasi telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 4 dari UU No. 25 tahun 1992 telah menetapkan fungsi dan peran koperasi adalah:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. berperan serta secara aktif dalam upaya memperbaiki tingkat kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bentuk usaha-usaha pelayanan koperasi kepada para anggotanya disesuaikan dengan bentuk dan jenis koperasi. Bentuk dan jenis koperasi yang ada lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara umum usaha koperasi dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu:

1. koperasi konsumsi.
2. koperasi kredit.
3. koperasi produksi.
4. koperasi jasa.
5. koperasi serba usaha. (Panji A dan Ninik W, 1993: 19)

Badan usaha koperasi tersebut dapat dibentuk oleh masyarakat pada berbagai tempat, dengan mengindahkan semua syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 telah menetapkan syarat pembentukan koperasi (pasal 6) adalah:

1. koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Sedangkan pada pasal 7 dinyatakan bahwa:

1. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, koperasi dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan organisasi, yaitu: Rapat Anggota; pengurus; dan badan pemeriksa. Alat-alat yang merupakan perlengkapan organisasi tersebut harus dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang sudah digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 maupun di dalam Anggaran Dasarnya. Apabila alat-alat perlengkapan yang ada pada koperasi tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, maka tujuan koperasi lebih memungkinkan dapat tercapai.

Untuk mengoptimalkan peranan koperasi, maka koperasi perlu dibina oleh Pemerintah. Untuk membina koperasi, maka landasannya telah ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada ketetapan ini ditetapkan bahwa: Pembangunan koperasi sebagai wadah untuk kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam jiwa masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin dapat mandiri dan andal dan dapat memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. (M.J.Morris, 1993 : 17)

Dengan perkataan lain koperasi perlu dibina agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Tujuan koperasi sebagaimana dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 adalah: mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun suatu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Seiring dengan usaha memajukan koperasi, disisi lain koperasi juga menghadapi berbagai hambatan antara lain:

1. pembentukan modal.
2. kemampuan pengurus.
3. manajer profesional.
4. posisi tawar menawar.
5. kemampuan menyerap teknologi.
6. sarana dan prasarana.
7. aspek kelembagaan.
8. aspek perbankan.
9. aspek kebijaksanaan. (M.Amin Azis, 1993 : 3)

Penulis lain mengemukakan, hambatan koperasi adalah:

1. fungsi sosial koperasi.
2. asas dan sendi dasar koperasi.
3. organisasi dan struktur manajemen.
4. partisipasi anggota.
5. manfaat koperasi bagi anggota.
6. dan motif keuntungan pada koperasi. (Panji A dan

Ninik W, 1993 : 113)

Bila pada perusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) struktur manajemen yang ada melahirkan suatu keputusan yang sifatnya top down, maka pada koperasi memang lain. Koperasi adalah organisasi otonom dan demokratis. Struktur manajemen yang ada berorientasi pada rapat-rapat anggota. Dengan demikian, prosedur pengambilan keputusan adalah bottom up. Pada koperasi pengurus bertanggungjawab pada rapat anggota. (P.Hasibuan, 1986 : 39)

Dengan demikian pengelolaan koperasi lain dengan perusahaan non-koperasi. Seorang pimpinan atau pengelola koperasi haruslah seorang enterpreneur plus yang mempunyai orientasi dan komitmen pada masyarakat banyak. Mengapa ? Sebab prinsip keanggotaan koperasi adalah terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor penguruslah yang menjadi kunci persoalan koperasi. Dalam hal ini kejujuran pengurus memang sangat menentukan, tapi bukan satu-satunya. Faktor kejujuran saja, ternyata belum cukup. Ada faktor lain yang juga menentukan yaitu: kemampuan mengelola suatu usaha serta partisipasi anggota. Demikian juga mekanisme komunikasi antara anggota dan para pengurus sebaiknya tidak timpang, sebab pada akhirnya dapat berakibat pada rendahnya partisipasi anggota yang tentu saja akan melemahkan kemandirian koperasi, serta akan merusak kinerja koperasi.



Dengan demikian koperasi memang berbeda dengan badan usaha swasta serta badan usaha milik negara, baik struktur maupun pengelolaannya. Karakteristik koperasi adalah aspek kebersamaan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Pendekatan:**

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum (UU No. 25 Tahun 1992) yang mengatur: pembentukan, pengelolaan dan pembinaan koperasi dalam praktik. Demikian juga penelitian ini akan meneliti realitas KPN Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Permasalahan penelitian dikaji secara deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Dengan kata lain titik tolak pengkajian penelitian ini adalah beranjak dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan koperasi. Dalam hal ini adalah UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya peraturan tersebut dalam praktik (pada KPN IAIN) digunakan data lapangan (pendekatan sosiologis).

##### **3.2. Pengumpulan Data :**

Untuk mendapatkan data-data guna penelaahan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka digunakan dua metode sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum primer berupa Undang Undang

Dasar 1945, Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN dan juga UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya.

Demikian juga pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan buku buku ilmiah, diantaranya: Pelaksanaan Sistem Pertanggung Jawaban Koperasi Di Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang (Syamsul Bachri, 1992). Hukum Koperasi (Abdulkadir M, 1982). Dinamika Koperasi serta Manajemen Koperasi (Panji Aneraga dan Ninik W, 1995). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Soerjono Soekanto, 1982).

2. Penelitian Lapangan, untuk mendapatkan data dari lapangan maka prosedurnya dilakukan dengan jalan mewawancarai para sumber data, dalam hal ini pengurus dan anggota KPN Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang yang dipilih secara selektif, yaitu:
  1. Pengurus empat orang.
  2. Anggota lima orang,
  3. Badan Pemeriksa satu orang.
  4. dan dari pegawai Kandep Koperasi dan PPK Kotamadya Ujung Pandang satu orang.

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan pedoman wawancara yang terstruktur. Data yang diharapkan terkumpul selain data kualitatif juga data yang

bersifat kuantitatif dalam bentuk data sekunder mengenai perkembangan KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang.

### 3.3. Analisis Data:

Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data kualitatif secara umum, akan tetapi untuk melengkapinya maka juga dikumpulkan data kuantitatif meskipun dalam wujud data sekunder.

Untuk itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode kualitatif" dengan caranya, melakukan pengkategorian, penganalisaan dan dilanjutkan dengan interpretasi data.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diteliti sejauh mana pelaksanaannya pada Koperasi Pegawai Negeri ( KPN ) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Tujuan dan Fungsi Koperasi:

Tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 yaitu: untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Sedangkan fungsi Koperasi sebagaimana pasal 4 adalah:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal tersebut di atas telah dijabarkan di dalam pasal 2 ayat (2) Anggaran Dasar KPN IAIN Alauddin yang menyatakan bahwa: Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan dari daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang upaya terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hanya saja, pelaksanaan aturan tersebut di dalam praktik belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan koperasi yang tidak menggembirakan. Menurut hasil wawancara baik kepada pengurus maupun kepada para anggota penyebabnya adalah, pengurus yang tidak profesional di dalam hal mengelola koperasi.

Hal ini tentu saja sangat ironis, oleh karena di dalam ajaran Islam telah dicanangkan bahwa, sesuatu hal atau pekerjaan haruslah diserahkan kepada ahlinya sebab bila tidak maka tinggilah kehancurannya.

Dengan demikian meskipun KPN ini telah berusia 18



tahun beroperasi dari sejak didirikannya pada tanggal 16 September 1978, hingga kini para anggotanya belum dapat menyaksikan, apalagi menikmati Sisa Hasil Usaha (SHU).

#### 4.2. Anggaran Dasar:

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 telah ditetapkan bahwa, pembentukan koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Sedangkan di dalam pasal 8 menetapkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

1. daftar nama pendiri.
2. nama dan tempat kedudukan.
3. maksud dan tujuan serta bidang usaha.
4. ketentuan mengenai keanggotaan.
5. ketentuan mengenai rapat anggota.
6. ketentuan mengenai pengelolaan.
7. ketentuan mengenai permodalan.
8. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
10. ketentuan mengenai sanksi.

Secara umum ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah termuat di dalam Anggaran Dasar KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang. Hal yang tidak termuat adalah ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Demikian juga dengan ketentuan mengenai sanksi.

Pada hal khusus mengenai ketentuan tentang sanksi adalah sangat prinsip. Baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maupun untuk memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran dalam hal pengelolaan usaha koperasi.

Bila sejak awal masalah sanksi itu tidak termuat didalam Anggaran Dasar KPN IAIN Alauddin, maka pengurus bersama anggota dapat mengusahakannya untuk mencantumkan dengan merubah anggaran dasar yang ada. Hal ini dimungkinkan sebagaimana pasal 30 Anggaran Dasar yang menyatakan:

- (1) Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah dari anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya rapat anggota syah menurut ketentuan pasal 29 ayat (3) bila dihadiri 20 % dari pada jumlah anggota koperasi.

Terlebih lagi dengan melihat realitas yang ada saat ini dimana pengurus atau pengelola koperasi telah melakukan banyak pelanggaran terhadap UU No. 25 Tahun

1992 dan Anggaran Dasar Koperasi. Pelanggaran tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian-bagian yang berikutnya.

Hal mendasar lainnya yang harus dirobah dari Anggaran Dasar adalah "Asas Koperasi" yang masih tetap mencantumkan "Asas Kekeluargaan" seharusnya telah lama dirobah dengan "Asas Pancasila" sebagaimana pasal 2 UU No. 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa: Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan.

Perubahan-perubahan anggaran dasar tersebut juga diperkenankan oleh pasal 12 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 bahwa; Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.

Masalah yang cukup pelik dalam kaitan dengan anggaran dasar ini adalah, dari hasil wawancara yang ada baik pengurus maupun anggota semuanya mengatakan kalau tidak memahami apa yang menjadi isi dari Anggaran Dasar KPN IAIN Alauddin, apatah lagi hendak mengamalkannya.

Pengakuan dari pengelola usaha koperasi berkaitan dengan landasan yang menjadi pegangan di dalam mengelola koperasi, menurut pengakuannya adalah dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan dagang yang dimilikinya serta sesuai dengan pengalaman pengelola koperasi sebelumnya (oleh karena yang diteliti adalah kepengurusan periode 1992 hingga 1994).

#### 4.3. Keanggotaan, Kewajiban dan Hak:

Keanggotaan koperasi diatur dalam pasal 17, 18 dan 19. Sedangkan masalah kewajiban dan hak diatur di dalam pasal 20.

Dalam pasal 17 dikemukakan bahwa:

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pada pasal 18 dinyatakan bahwa:

- (1) Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu untuk melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratannya, hak dan kewajiban-kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19 menegaskan bahwa:

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur di

dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

- (3) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Sedangkan pada pasal 20 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
  - 1. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
  - 2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
  - 3. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
  - 1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan juga memberikan suara dalam rapat anggota.
  - 2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.
  - 3. meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
  - 4. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
  - 5. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan

yang sama antara sesama anggota.

6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koeprasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Bila pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan anggaran dasar KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang, maka juga secara umum juga termuat dalam anggaran dasarnya. Hanya saja khusus untuk pengaturan masalah kewajiban para anggota tidak jelas, oleh karena tidak ada pasal yang mengaturnya secara jelas. Dengan kata lain pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban anggota diatur dalam anggaran rumah tangga, sementara anggaran rumah tangga tersebut hingga kini belum ada, demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya.

Pada pasal 7 Anggaran Dasar disebutkan bahwa:

- (1) Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain erang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.

Dalam pasal 8 diatur bahwa, setiap anggota berhak:

- (1) Berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu.
- (2) Untuk memilih dan dipilih.



- (3) Untuk menelaah pembukuan koperasi pada waktu kantor dibuka.
- (4) Untuk memberi saran-saran guna perbaikan dari koperasi.

Demikian halnya dengan pelaksanaan dalam praktik dari amanah undang-undang dan anggaran dasar tentang kewajiban dan hak anggota, belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Data-data yang ada dapat membuktikan hal tersebut di atas. Hingga kini para anggota koperasi yang telah berjumlah 250 orangan (data tahun 1995) yang terlibat memanfaatkan usaha koperasi hanya sekitar 70 orang. Alasan dari para anggota sehingga tidak memanfaatkan usaha "pertokoan" yang dikelola koperasi sangat banyak dan bervariasi, diantaranya: harga barang-barang dari koperasi sangat mahal; barang-barang konsumsi yang dijual koperasi sangat terbatas; dan alasan yang sangat banyak dikemukakan para anggota bahwa, untuk apa ikut berpartisipasi bila koperasi hingga kini tidak sehat dan tidak banyak manfaatnya bagi para anggota.

Juga yang tercatat sebagai anggota koperasi bila dibandingkan dengan jumlah Pegawai IAIN masih kurang dan untuk itu sebaiknya para pengurus dan pimpinan IAIN dapat memperhatikan hal ini. Data jumlah pegawai IAIN (tahun 1995) adalah: 534 orang dengan rincian:

1. Jumlah dosen adalah : 188 orang
2. Pegawai administrasi: 346 orang

Dari jumlah 534 orang pegawai tersebut yang telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang hanya, 250 orang.

Meskipun demikian, angka tersebut telah meningkat bila dibandingkan dengan data tahun 1989 dengan jumlah pegawai sebanyak 246 orang dengan jumlah pegawai yang tercatat sebagai anggota koperasi adalah sebanyak 217 orang.

Akibat langsung dari kurangnya anggota yang ikut memanfaatkan usaha koperasi adalah rendahnya keuntungan yang dapat diperoleh koperasi. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat diperoleh koperasi pada akhir tahun. Untuk itu disamping perlunya pengurus menggalakkan meningkatnya partisipasi anggota, maka pengurus koperasi juga perlu meningkatkan volume dan jenis usaha koperasi sebagaimana telah diamanahkan anggaran dasar pasal 3 bahwa:

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota-anggotanya untuk menyimpan pada koperasinya secara teratur.
2. Memberikan pinjaman uang kepada anggota-anggota nya yang membutuhkan untuk keperluan yang

berfaedah.

3. Mengadakan usaha pembelian bersama/penjualan bersama barang-barang/alat-alat yang dibutuhkan anggota.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha yang sesuai dengan kepentingan bersama anggota-anggotanya yang tidak bertentangan azas perkoperasian dan peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Menambah pengetahuan untuk anggota-anggota tentang perkoperasian.

Mengenai masalah hak anggota dan pelaksanaannya di dalam praktik juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, yang berkaitan dengan masalah prinsip yang dialami koperasi IAIN saat ini yang telah kurang lebih empat tahun belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Seharusnya para anggota yang ada dapat menggunakan haknya untuk meminta para pengurus untuk segera melaksanakan rapat anggota tahunan, akan tetapi hal tersebut tidak difungsikan oleh para anggota. Hal tersebut telah menjadi indikasi bahwa para anggota koperasi tidak ikut prihatin dengan perkembangan koperasi, pada hal hidup dan matinya suatu koperasi adalah sangat tergantung pada partisipasi dan keterlibatan para anggota-anggotanya. Untuk itu diharapkan perlunya keterlibatan Pimpinan IAIN untuk menyelesaikan masalah ini.

#### **4.4. Perangkat Organisasi:**

Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 telah menetapkan bahwa perangkat organisasi suatu badan usaha koperasi terdiri dari:

1. Rapat anggota.
2. Pengurus.
3. Pengawas.

Perangkat organisasi tersebut selanjutnya akan di teliti sejauh mana penjabarannya dalam anggaran dasar KPN Al-Muawanah dan bagaimana pelaksanaannya di dalam praktik kehidupan koperasi sehari-hari.

##### **4.4.1. Rapat Anggota:**

Rapat anggota diatur dalam pasal 22 hingga pasal 28 UU No. 25 tahun 1992 yang kuitpannya secara lengkap dapat dilihat berikut ini.

Pada pasal 22 ditetapkan bahwa:

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pada pasal 23 ditetapkan bahwa, Rapat anggota menetapkan:

1. Anggaran Dasar.
2. kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
3. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

4. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5. pengesahan pertanggung-jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. pembagian sisa hasil usaha.
7. penggabungan, peleburan, pembagian dan juga pembubaran koperasi.

Pada pasal 25 dinyatakan bahwa: Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Pasal 26 dengan sangat jelas telah menetapkan bahwa:

1. Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Sedang pada pasal 27 ditetapkan bahwa:

1. Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Koperasi dapat melakukan rapat anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

2. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Dan pada pasal 28 dijelaskan bahwa: persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.

Peraturan-peraturan di atas telah dijabarkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Alauddin Ujung Pandang, sebagaimana dapat dilihat pada pasal-pasal berikut.

Pada pasal 28 telah dijelaskan bahwa:

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
2. Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota.
3. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga koperasi.
4. Rapat anggota dapat diadakan:
  - a. Atas kehendak pejabat.



- b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.
  - c. Atas kehendak pengurus.
5. Laporan pengurus, laporan badan pemeriksa, neraca, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, tanggal dan tempat dan acara rapat anggota harus sudah di terima oleh anggota dan pejabat sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal di adakannya rapat anggota tahunan.
6. Dalam hal anggota mencapai jumlah yang besar, rapat anggota dapat dilaksanakan/diadakan melalui cara rapat perwakilan anggota, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga koperasi.

Selanjutnya dalam pasal 29 dijelaskan bahwa:

1. Pada dasarnya rapat anggota syah jika yang hadir lebih dari pada separoh jumlah anggota koperasi.
2. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila rapat kedua tetap tak tercapai syarat tersebut maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam

keadaan luar biasa.

3. Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat anggota syah bila dihadiri 20 % dari pada jumlah anggota koperasi.
4. Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa, dalam ayat 3 pasal ini adalah:
  - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi, atau.
  - b. Apabila keadaan negara atau peraturan peraturan/ketentuan-ketentuan penguasa baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota, atau.
  - c. Apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh ~~tidak~~ harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar atas dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang di adakan menurut ketentuan ayat 3 (tiga) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan koperasi.
  - d. Apabila perubahan anggaran dasar harus di adakan berhubung ketentuan undang-undang

atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

5. Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam suatu permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
6. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya apada orang lain.

Untuk masalah perubahan anggaran dasar, juga di mungkinkan untuk dilakukan, oleh karena hal tersebut telah diatur secara jelas didalam pasal 30 yang antara lain menyatakan:

1. Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
2. Untuk membubarkan koperasi harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari pada jumlah anggota koperasi sedang keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara yang hadir.
3. Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan

berhubung dengan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya rapat anggota sah menurut ketentuan pasal 29 ayat (3) bila dihadiri 20 % dari pada jumlah anggota koperasi.

Demikian halnya dengan rapat anggota yang harus dilakukan setiap tahun, ketentuannya jelas dalam anggaran dasar koperasi sebagaimana dapat dilihat pada pasal 32 yang menyatakan:

1. Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sesudah tutup tahun buku.
2. Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain:
  - a. Pembukaan.
  - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara/notulen rapat anggota yang lampau.
  - c. Laporan pertanggung-jawaban pengurus tentang kegiatannya selama tahun kerja yang lalu, dengan menyediakan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan selama tahun buku yang bersangkutan.
  - d. Laporan badan pemeriksa.
  - e. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan badan pemeriksa.
  - f. Pengesahan laporan pengurus dan badan

...pemeriksa.

- g. Pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
- h. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha.
- i. Pemilihan anggota pengurus dan atau anggota badan pemeriksa.

- 3. Neraca dan perhitungan keuangan tahunan di kirim oleh pengurus kepada pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat anggota.

Dengan demikian rapat anggota merupakan salah satu hal yang juga masih menjadi masalah pada KPN IAIN Alauddin Ujung Pandang, bahkan dapat digolongkan dalam masalah utama.

Baik dalam Anggaran Dasar terlebih lagi dalam UU No. 25 tahun 1992 telah menegaskan bahwa setiap tahun diadakan rapat anggota. Rapat anggota tersebut harus diadakan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah tahun buku. Rapat anggota tersebut adalah wadah untuk dapat menilai perkembangan koperasi serta meminta pertanggung jawaban pengurus.

Sedangkan realitas yang ada pada KPN IAIN saat ini, pengurus yang ada (masih pengurus periode tahun

1992 - 1994) sampai dengan awal tahun 1996, belum juga pernah melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Terlebih lagi untuk penggantian pengurus dan pertanggung-jawaban pengurus. Suatu pelanggaran Undang Undang dan Anggaran Dasar yang tidak dapat ditolerir lagi.

Masalahnya para anggota koperasi Al-Muawanah IAIN yang seharusnya ikut prihatin dengan masalah ini dan pada akhirnya bernisiatif untuk meminta agar segera di adakan "Rapat Anggota Luar Biasa" (pasal 28 dan 29 AD) juga tidak pernah peduli dengan hal tersebut. Hingga masalahnya menjadi semakin kompleks.

Alasan yang dikedepankan oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak di laksanakan karena para pengurus sangat sibuk dengan tugas-tugas lainnya sebagai dosen dan pegawai. Suatu alasan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Masalah yang penulis temukan sebagai penyebabnya adalah tidak adanya saling kerja sama antara pengurus, anggota dan badan pemeriksa. Demikian juga umumnya mereka tidak paham tentang tujuan dan fungsi dari KPN Al-Muawanah IAIN baik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 maupun apa yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Salah satu contoh yang menarik dalam kaitan ini adalah, ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Umum KPN IAIN berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur masalah koperasi, dalam hal ini Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 ternyata mereka baru mengetahui kalau ada undang-undang baru yang mengatur masalah perkoperasian sebagai pengganti dari Undang Undang No. 12 Tahun 1967. Untuk itu diharapkan juga kepada para pengurus dan anggota koperasi serta pihak Pimpinan IAIN untuk dapat ikut bekerja sama menyelesaikan masalah ini, oleh karena hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

#### 4.4.2. Pengurus:

Pengaturan tentang masalah "pengurus" dalam Undang Undang No. 25 tahun 1992 terdapat antara lain di dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34 dan pasal 35 yang secara jelas isinya dikutip berikut ini.

Pasal 30 menegaskan bahwa:

1. Pengurus bertugas:

- a. mengelola koperasi dan usahanya.
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. menyelenggarakan rapat anggota.
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2. Pengurus berwenang:

- a. mewakili koperasi di dalam dan di luar

pengadilan.

- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam pasal 31 menjelaskan bahwa: Pengurus harus bertanggung-jawab mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi dan juga usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pada pasal 32 diatur pula bahwa:

1. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
2. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.
3. Pengelola bertanggung-jawab kepada pengurus.
4. Pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung-jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31.



Sementara pasal 34 telah mengatur bahwa:

1. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Disamping penggantian kerugian tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pada akhirnya pasal 35 menegaskan bahwa: Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1(satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan juga perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- b. keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Aturan-aturan di atas sejalan dengan aturan-aturan yang ada di dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang, yang antara lain dapat dilihat pada pasal-pasal 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan pasal 19 yang dikutip sebagai

berikut.

Pada pasal 9 dinyatakan:

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
2. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari jumlah pengurus.
3. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
  - b. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
4. Belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ekonomi atau dihukum karena melakukan kejahatan lainnya.
5. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha koperasi atau mempunyai usaha yang dapat merugikan koperasi.
6. Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Dalam pasal 10 secara tegas dinyatakan bahwa:

1. Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

2. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa:
  - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi.
  - b. Pengurus tidak mentaati Undang Undang Koperasi serta peraturan-peraturan/ketentuan ketentuan pelaksanaannya.
  - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.
3. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau, dapat dipilih kembali.
4. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat atau memilih gantinya akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 12 menetapkan tentang tugas pengurus yaitu:

1. Pengurus bertugas untuk:
  - a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi.
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
  - c. Mewakili koperasi dihadapan dan di luar pengadilan.
2. Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan oleh rapat

**pengurus.**

Sedangkan dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota.

Dalam pasal 16 juga dijelaskan bahwa:

1. Pengurus wajib memberi laporan kepada pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
2. Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga peraturan khusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
3. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota dan pejabat.
4. Pengurus diwajibkan memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
5. Perselisihan yang timbul karena hanya berkaitan dengan kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalahan satu pihak.

6. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota terutama pelaksanaan rapat anggota tahunan.

Akhirnya pasal 19 menegaskan bahwa:

1. Manager bertindak sebagai pimpinan perusahaan dan bertugas menjalankan usaha koperasi sehari hari termasuk kegiatan pembelian/penjualan dan kegiatan lain yang ditangani koperasi. Semua ini dilaksanakan dibawah pengawasan pengurus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam penunjukannya sebagai manajer.
2. Manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus atas dasar perjanjian kerja yang di adakan untuk itu.
3. Manager dapat mempekerjakan, mengawasi dan memberhentikan karyawan/pegawai koperasi dengan memperhatikan anggaran belanja koperasi. Pengangkatan karyawan/pegawai koperasi tersebut dilakukan/disahkan oleh pengurus atas usul manager.
4. a. Didalam melaksanakan tugasnya manajer bertindak atas kuasa dan atas nama pengurus.  
b. Manager bertanggung-jawab kepada pengurus.  
c. Syarat untuk dapat dipilih menjadi manager

koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga setelah mendengar pendapat pejabat.

5. Penghasilan dan pengeluaran-pengeluaran untuk manager ditetapkan oleh pengurus.
6. Semua penggunaan dan pengeluaran untuk kegiatan koperasi yang dilakukan manager harus berpedoman kepada anggaran belanja koperasi dan harus di pertanggung-jawabkan kepada pengurus.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa apa yang ditetapkan dalam undang undang koperasi telah juga dimuat dalam anggaran dasar koperasi. Hanya saja yang menjadi masalah adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan amanah undang-undang dan anggaran dasar tersebut dalam praktik. Didalam praktiknya pelaksanaan amanah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penyebabnya menurut pengakuan pengurus adalah, pengurus yang tidak profesional sebagai pengelola suatu badan usaha seperti koperasi. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pengelolaan usaha koperasi yang terbatas, seperti untuk pertokoan dan perkantoran, bahkan ruangan untuk perkantoran sama sekali tidak ada.

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, jangan kan untuk profesional dalam mengelola usaha koperasi, memahami saja apa tugas-tugasnya sebagai pengurus dari

koperasi, tidak dipahami sebagaimana mestinya, hingga pada akhirnya juga tidak akan memahami apa yang tidak boleh dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pengurus koperasi. Hal yang lebih menarik lagi dari hasil yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa, pengurus pada umumnya tidak pernah melihat dan membaca apa isi dari anggaran dasar koperasi.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 serta Anggaran Dasar yang ada, tidak mengharuskan pengurus haruslah ia seorang yang profesional. Yang harus profesional adalah manajer dan badan pengawas koperasi dan untuk itu bila pengurus tidak dapat menjalankan atau mengelola badan usaha koperasi secara profesional, maka kepada pengurus diperkenankan untuk mengangkat manajer atau pengelola yang profesional.

Penyebab lain yang peneliti temukan dan diduga sebagai penyebab kurang dihayatinya tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan pengelola koperasi adalah tidak diamlkannya pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar dari Koperasi yang mewajibkan kepada "pengurus" sebelum melaksanakan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Terlebih lagi dengan pasal 35 UU No. 25 tahun 1992 dan pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar tentang kewajiban membuat laporan dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga hampir 3 (tiga) periode kepengurusan yaitu



dari tahun 1992 hingga 1996 RAT tersebut hingga kini belum juga dilaksanakan.

Demikian juga dengan amanah pasal 16 Anggaran Dasar yang mewajibkan pengurus untuk "memberikan laporan kepada pejabat" atau Pemerintah dalam hal ini Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kotamadya Ujung Pandang, tentang keadaan serta sejauh mana perkembangan organisasi koperasi sebagai badan usaha dan masalah-masalahnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, hingga kini juga belum pernah dilakukan sejak Januari 1985.

Hal inilah yang menyebabkan Pengelola Pembinaan Koperasi Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Ujung Pandang sesuai amanah pasal 60 UU No. 25 Tahun 1992 terpaksa dihentikan, karena KPN Al-Muawanah melalaikan kewajibannya untuk memberikan laporan. Padahal dengan dasar laporan itulah kemudian Pemerintah dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan, sebagaimana baiknya.

Bila Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang ingin ditempatkan posisinya pada peringkat koperasi yang ada, maka berdasarkan dengan permasalahan yang ada di atas, sebagaimana juga dikatakan oleh Pegawai Kandep Koperasi dan PPK Kotamadya dapat dikategorikan sebagai "Koperasi Yang Tidak Sehat".

Untuk itu diharapkan kepada para pihak yang sama terkait dengan masalah yang dialami oleh KPN IAIN ini



untuk bersama-sama pula melakukan tindakan dalam upaya mewujudkan dan mengelolanya sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 serta menurut Anggaran Dasar yang ada.

#### 4.4.3. Pengawas:

Pengawas atau Badan Pemeriksa diatur dalam pasal 39 UU No. 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa:

1. Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

2. Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3. Pengawasan harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Aturan di atas sejalan dengan pasal 20 Anggaran Dasar yang dengan jelas menetapkan bahwa:

1. Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan di dalam pasal 24, maka koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
2. Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu badan pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih oleh rapat

anggota untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

3. Yang dapat dipilih menjadi badan pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki sifat-sifat kejujuran.
  - b. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.
4. Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan pula mengenai kebenaran pembukuan serta hal hal mengenai kebijaksanaan pengurus di dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan koperasi.
5. Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis yang harus di sampaikan oleh pengurus kepada anggota koperasi dan salinannya dikirimkan kepada pejabat.
6. Badan pemeriksa sebelum melakukan tugas-tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Amanah yang terdapat pada pasal di atas juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu pesaham yang menyebabkan tidak sehatnya KPN IAIN, dan juga tidak berkembangnya usaha yang dijalankan oleh koperasi.

Masa jabatan badan pemeriksa sebagaimana diatur di dalam pasal 20 ayat (2) yaitu satu tahun, tidak juga pernah dilaksanakan dalam praktik. Bagaimana mungkin untuk melaksanakan amanah anggaran dasar di atas bila masa jabatan pengurusnya saja yang telah berlalu selama 4 (empat) hingga kini belum juga diadakan penggantian.

Demikian juga dengan pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pengelolaan uang; surat berharga; serta persediaan barang; pembukuan dan kebijaksanaan pengurus, juga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan demikian hal ini juga menjadi penyebab tidak sehat atau lemahnya kinerja KPN IAIN baik dari sudut: manajemen; administrasi; kepengurusan dan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan, tidak berfungsinya badan pemeriksa disebabkan kurang dipahaminya dengan baik tugasnya. Demikian juga badan pemeriksa yang ada kurang proaktif dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Dari hasil penelitian juga ditemukan sebab lain sehingga tugas badan pemeriksa tidak berjalan, oleh karena badan pemeriksa justru melimpahkan kesalahan pada pengurus yang antara lain alansannya: pembukuan koperasi yang tidak ada, jadi apanya yang mau diperiksa !

Semakin jelas sekali bahwa badan pemeriksa tidak memahami akan tugas-tugas dan fungsinya. Dalam undang undang dan anggaran dasar koperasi dijelaskan bahwa,

badan pemeriksa juga bertugas untuk membimbing pembukuan yang baik, bukan justru membiarkan kesalahan tersebut berlarut-larut. Hal lain yang tidak dijalankan sesuai dengan amanah anggaran dasar pasal 20 ayat (6) adalah aturan yang menetapkan bahwa badan pemeriksa sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih dahulu harus mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan dari rapat anggota.

#### 4.5. Modal:

Masalah permodalan diatur dalam pasal 41 Undang Undang NO. 25 tahun 1992 yang menegaskan bahwa:

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. simpanan pokok.
  - b. simpanan wajib.
  - c. dana cadangan.
  - d. hibah.
3. Modal pinjaman dapat berasal dari:
  - a. anggota.
  - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya.
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya.
  - d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya.
  - e. sumber lain yang sah.

Pada KPN IAIN masalah permodalan juga menjadi salah

satu penyebab tidak berkembangnya usaha koperasi serta tidak sehatnya koperasi. Hal tersebut timbul oleh karena sumber-sumber dana yang dapat meningkatkan jumlah modal, belum dikelola secara maksimal.

Sebagaimana dalam anggaran dasar pasal 33 ayat (1) menetapkan bahwa: Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposite uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.

Selanjutnya pada pasal 34 dinyatakan bahwa:

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp.3.000,- (TIGA RIBU RUPIAH) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali angsuran bulanan.
3. Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
4. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar uang simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran rumah

tangga/peraturan khusus.

5. Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan uang simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

Uang simpanan pokok sebesar Rp.3.000,- demikian juga dengan uang simpanan wajib Rp.250,- bila kita kaitkan dengan kondisi perekonomian sekarang, jelas, sudah pada tempatnya untuk diadakan penyesuaian.

Bila kita bandingkan dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Universitas Hasanuddin jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| a. Untuk Golongan I   | = Rp. 3.000,- |
| b. Untuk Golongan II  | = Rp. 5.000,- |
| c. Untuk Golongan III | = Rp.10.000,- |
| d. Untuk Golongan IV  | = Rp.15.000,- |

2. Simpanan Wajib:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| a. Untuk Golongan I   | = Rp. 1.000,- |
| b. Untuk Golongan II  | = Rp. 2.000,- |
| c. Untuk Golongan III | = Rp. 3.000,- |
| d. Untuk Golongan IV  | = Rp. 4.000,- |

Jelas sekali terlihat perbandingan yang sangat jauh. Dengan uang simpanan pokok Rp.3.000,- dan simpanan wajib Rp. 250,- setiap bulan untuk 250 orang anggota

koperasi, maka berapa modal koperasi yang dapat di peroleh setiap bulan. Dengan jumlah uang yang kecil tersebut tentu saja berakibat langsung kepada kegiatan atau usaha yang dapat dijalankan oleh koperasi.

Untuk itu bila kinerja usaha KPN Al-Muawanah IAIN ingin ditingkatkan maka salah satu usaha yang harus dilakukan adalah dengan merobah atau memperbaiki anggaran dasar pasal 34 tentang simpanan wajib dan simpanan pokok, dengan cara meningkatkan jumlahnya, paling tidak seperti yang dicontohkan di atas.

#### 4.6. Lapangan Usaha:

Pasal 43 Undang No. 25 tahun 1992 menegaskan hal usaha koperasi sebagaimana berikut:

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk upaya meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota,
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan serta di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Selanjutnya dalam pasal 44 ditetapkan bahwa:

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan nya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. anggota koperasi yang bersangkutan.
  - b. koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan dalam pasal-pasal di atas juga telah di amanahkan pula dalam pasal 3 anggaran dasar yang telah menetapkan usaha-usaha koperasi antara lain:

- a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota-anggotanya untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- b. Memberikan pinjaman uang kepada anggota anggotanya yang membuthkan untuk keperluan yang berfaedah.
- c. Mengadakan usaha pembelian bersama/penjualan bersama-barang-barang/alat-alat yang sangat dibutuhkan anggota.
- d. Menyelenggarakan usaha-usaha yang sesuai dengan kepentingan bersama anggota-anggotanya yang tidak bertentangan azas perkeoperasian dan peraturan Pemerintha yang berlaku.
- e. Menambah pengetahuan untuk anggota-anggota tentang perkeoperasian.

Dalam praktik usaha koperasi yang berjalan sejak



didirikannya hingga kini baru sebatas usaha pertokoan yang juga hanya terbatas pada kebutuhan sehari-hari para anggota. Usaha itupun berjalan secara tersendat-sendat dengan berbagai kendala yang dihadapinya. Baik menyangkut rendahnya partisipasi anggota sebagaimana telah peneliti ungkapkan terdahulu, dari 250 anggota koperasi, anggota yang memanfaatkan usaha koperasi (aktif memanfaatkan jasa koperasi) hanya sekitar 70 orang.

Demikian juga dengan sarana pertokoan yang ada sangat terbatas, sehingga pengelola koperasi mengusulkan kepada pimpinan IAIN untuk menambah ruangan untuk ruang pertokoan. Termasuk di dalamnya ruangan untuk digunakan sebagai ruang perkantoran yang hingga kini tidak ada.

Sebenarnya hal tersebut seharusnya diusahakan sendiri pengembangannya oleh pihak koperasi, akan tetapi hal itu jelas tidak mungkin dilakukan mengingat untuk dana pengelolaan koperasi dan pengelolaan usaha yang sangat terbatas. Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan besarnya jumlah modal koperasi yang dapat diterima dari simpanan wajib anggota setiap bulan yang sangat terbatas.

Hanya ada satu jalan yang dapat ditempuh untuk ~~mengembangkan koperasi~~ agar dapat seperti KPN-KPN lainnya yaitu, dengan meningkatkan permodalan. Apakah dengan cara meningkatkan besarnya uang simpanan pokok dan simpanan wajib, ataukah dengan suntikan dana dari lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti bank.

#### 4.7. Sisa Hasil Usaha:

Undang undang No. 25 tahun 1992 menegaskan bahwa:

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan juga kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing masing anggota dengan Koperasi, serta untuk digunakan bagi keperluan pendidikan perkoperasi an dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Aturan tersebut di atas kemudian juga terjabarkan dalam anggaran dasar pasal 37 yang menetapkan:

1. Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu terdiri atas 2 (dua) bagian:
  - a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggara kan untuk anggota koperasi.

- b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
2. Bagian dari sisa pendapatan perusahaan yang dipergunakan sebagai berikut:
- a. 25 % untuk cadangan.
  - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha koperasi untuk dapat memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
  - c. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank pemerintah.
  - d. 10 % untuk dana pengurus.
  - e. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai.
  - f. 5 % untuk dana pendidikan koperasi.
  - g. 5 % untuk dana pembangunan daerah kerja.
  - h. 5 % untuk dana sosial.
3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota di bagi sebagai berikut:
- a. 50 % untuk cadangan.
  - b. 10 % untuk dana pegawai.
  - c. 10 % untuk dana pengurus.
  - d. 10 % untuk dana pendidikan koperasi.
  - e. 10 % untuk dana pembangunan daerah kerja.
  - f. 10 % untuk dana sosial.

4. Penggunaan dana-dana pendidikan koperasi dan pembangunan daerah kerja dapat diatur oleh direktur jenderal koperasi setelah mendengar Bapinkopda.

Bila pasal-pasal di atas dikaitkan dengan pasal 22 anggaran dasar yang mengatur tentang Pembukuan Koperasi, maka disinilah penyebab lain sehingga Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang tidak maju dan berkembang. Untuk itu sejak terbentuknya kepengurusan periode 1992 - 1994 hingga awal tahun 1996, maka Sisa Hasil Usaha (SHU) dari koperasi ini belum dapat peneliti temukan data-data dari SHU tersebut, disebabkan pembukuan koperasi yang tidak ada sebagaimana mestinya.

Data SHU yang dapat peneliti temukan hanya pada tahun 1990 sebesar Rp.1.009.266,- selain itu, seperti di kemukakan di atas data SHU belum dapat ditemukan. Suatu hal yang jika dilihat dari sudut Undang Undang No. 25 tahun 1992 dengan Anggaran Dasar koperasi, jelas tidak dapat dibenarkan dan dipertanggung-jawabkan, dan untuk itu perlu perhatian secara seksama.

Sebagai perbandingan SHU dari berbagai KPN dapat dilihat berikut ini:

1. SHU dari KPN UNHAS untuk RAT tahun 1994 adalah sebesar = Rp.8.230.818.335,-

2. SHU KPN Bhakti RRI Nusantara IV Ujung Pandang untuk RAT tahun 1994 sebesar = Rp.16.160.556 dengan jumlah anggota koperasi 322 orang.
3. SHU KPN IKIP untuk RAT tahun 1994 sebesar = Rp. 70.216.547.

Untuk mengembangkan SHU dimasa datang, maka hal-hal yang perlu dibenahi adalah:

1. Kepengurusan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Pengelolaan dan pengembangan usaha.
3. Pertanggung-jawaban pengurus harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dari 7 (tujuh) aspek utama Undang Undang No. 25 tahun 1992 yang dijadikan fokus penelitian secara umum telah terjabarkan juga dalam "Struktur Organisasi KPN Al-Muawanah IAIN Alauddin Ujung Pandang" sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasarnya. Hal yang tidak terjabarkan adalah "Asas Koperasi yang tidak didasarkan Pancasila; Kewajiban Anggota dan juga Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan Organisasi".

Demikian juga dengan pelaksanaan aturan tersebut di atas juga belum terlaksana sebagaimana mestinya. Untuk itu diharapkan kepada pengurus koperasi yang ada saat ini yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk mempertanggung-jawabkan kepengurusannya agar segera dapat melakukannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan:**

Struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang secara umum telah sesuai dengan aturan aturan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana terlihat dalam Anggaran Dasarnya.

Menjadi masalah, mengingat Anggaran Dasar tersebut dibuat pada awal berdirinya yaitu tahun 1978 dan hingga kini anggaran dasar tersebut belum pernah diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam perekonomian negara secara umum dan kemajuan yang terjadi dalam dunia koperasi saat ini. Untuk itu Anggaran dasar tersebut sudah seharusnya diadakan suatu perubahan dan perbaikan yang disesuaikan dengan kemajuan yang ada sekarang ini.

Aspek-aspek yang harus diperbaharui pada anggaran dasar tersebut adalah:

1. Asas koperasi yang tidak didasarkan pada Pancasila.
2. Bentuk-bentuk bidang usaha, baik secara umum maupun secara khusus.

3. Perubahan dan atau peningkatan besarnya uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib.
4. Demikian juga dengan belum dicantumkannya pasal tentang sanksi bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus dan anggota, sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 25 tahun 1992.
5. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah belum dibuatnya Anggaran Rumah Tangga sebagaimana perintah Anggaran Dasar, yang meskipun telah 18 tahun sejak didirikannya hingga kini belum juga direalisasikan pembuatannya.

Meskipun struktur organisasi KPN Al-Muawanah telah sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 sebagaimana pasal pasal yang ada di dalam anggaran dasar, akan tetapi pelaksanaan aturan-aturan tersebut dalam praktik belum berjalan sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya adalah:

1. Pengangkatan sumpah oleh para pengurus sebelum melaksanakan kepengurusannya.
2. Badan pengawas juga sebelum melaksanakan tugas tidak mengangkat sumpah dan masa jabatannya yang seharusnya hanya satu tahun juga tidak berjalan.
3. Rapat anggota tahunan serta pertanggung-jawaban pengurus yang hingga 4 (empat) tahun belum

juga dilaksanakan, sehingga rusaknya kinerja koperasi yang berakibat tidak sehatnya koperasi, dan tidak diketahuinya perkembangan sisa hasil usaha koperasi.

#### 5.2. Saran-saran:

Diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi KPN Al-Muawanah, ikut prihatin dengan realitas yang dihadapi KPN tersebut, dalam hal ini: pengurus; badan pemeriksa; anggota; pimpinan IAIN dan pemerintah, untuk secara bersama-sama memperbaiki KPN ini, sehingga KPN tersebut kembali menjadi sehat dan berkembang yang pada akhirnya dapat menduduki posisi sebagai "KPN A" atau sangat mantap.







## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad., Hukum Koperasi, Alumni, Bandung, 1982.
- Adikoesoema, R.Somita., Analisa Laporan Keuangan, Tarsito, Bandung, 1983.
- Chenaux, J.,Repond., Bagaimana Membaca Neraca, Sumur, Bandung, 1966.
- Danoewikarsa., Tanya Jawab Tentang Koperasi, Orba Shakti, Bandung, 1980.
- Entang Sastra., Pembangunan Koperasi Teori dan Kenyataan, Alumni, Bandung, 1985.
- Firdaus, M.Rahmat., Teori dan Analisa Kredit, Sarana Lingga Utama, Bandung, 1985.
- Hadiwidjaya, H.Rivai W., Koperasi dan Akuntansi, Pionir Jaya, Bandung, 1988.
- Koentjaraningrat., Metode Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Mulyadi., Akuntansi Biaya, Fak.Ekonomi, UGM, 1976.
- M.Amin Azis., Koperasi dan Agroindustri, CIDES, Jakarta, 1993.
- Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti., Manajemen Koperasi Teori dan Praktek, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Partadiredja, Atje., Manajemen Koperasi, Bhratara, Jakartam 1969.
- Sutrisno, Hadi., Metodologi Research, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.

Soerjono Soekanto., Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,  
Rajawali, Jakarta, 1982.

----- Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1988.

Peraturan-peraturan:

1. Anggaran Dasar Pendirian KPN IAIN 1982.
2. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
3. GBHN 1993-1998.
4. Laporan hasil-hasil RAT dari: KPN Unhas; KPN IKIP;  
KPN Bhakti Kencana RRI Nusantara IV Ujung Pandang  
(Tahun 1994) dan ~~RAT KPN Al-Muawanah~~ IAIN Alauddin  
1990.

Wawancara Dengan:

1. Pengurus Koperasi 1992-1994: Mursalim Buakang  
(Ketua umum), Syamsuddin AM (Wakil ketua), Abd.Azis  
(Bendahara), Muchlis (Wakil sekretaris).
2. Badan Pemeriksa dengan, Mannan Nur.
3. Anggota-anggota: Nurhaeda Rahman, Dudung Abdullah,  
Djasmin Ahmad, Makbul Rasyid, M.Amin Basri.
4. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil  
Kotamadya Ujung Pandang, Bapak Robert.

-----

